

Selamat pagi dan selamat datang di berita dari dunia pajak.

Hingga saat ini, otoritas pajak menolak memberikan keringanan pajak untuk pemeliharaan musim dingin dan biaya pembersihan salju yang berkaitan dengan jalan setapak umum karena layanan tersebut tidak dilakukan di properti pribadi. Pandangan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung.

Menurut keputusan Pengadilan Fiskal Federal, tidak ada persyaratan yang tinggi untuk bentuk aplikasi tunjangan anak, karena tunjangan anak berfungsi untuk melindungi prinsip pembebasan pajak dari tingkat subsisten minimum dan untuk mempromosikan keluarga.

Menurut Pengadilan Fiskal Hamburg, permintaan otoritas pajak untuk menyerahkan jurnal secara keseluruhan, di mana email yang tidak tunduk pada retensi juga harus dicantumkan atau disajikan sesuai dengan spesifikasi otoritas pajak, melebihi wewenang otoritas pajak dan oleh karena itu merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Karyawan wajib menginformasikan diri mereka sendiri tentang perubahan jadwal kerja di waktu luang mereka atau menerima instruksi dari pemberi kerja untuk menentukan jam kerja, misalnya melalui pesan teks.

Rancangan undang-undang untuk Undang-Undang Pelonggaran Birokrasi IV telah diterbitkan. Di antaranya, RUU ini berisi pengurangan periode penyimpanan dokumen akuntansi di bawah hukum komersial dan pajak dari sepuluh menjadi delapan tahun.

Apakah Anda memiliki pertanyaan mengenai artikel dalam edisi Informasi Bulanan kali ini atau topik lainnya? Jangan ragu untuk menghubungi kami.

Kami akan dengan senang hati memberi tahu Anda.

Untuk pembayar pajak penghasilan

Pemeliharaan musim dingin di jalan setapak umum yang dapat dikurangkan sebagai layanan terkait rumah tangga

Di banyak kota dan kotamadya, pemilik rumah diwajibkan untuk menjaga trotoar bebas dari salju dan es di musim dingin. Hingga saat ini, otoritas pajak menolak memberikan keringanan pajak untuk pemeliharaan musim dingin dan biaya pembersihan salju yang berkaitan dengan trotoar umum karena layanan tersebut tidak dilakukan di properti pribadi. Pandangan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung.



Dengan surat BMF tertanggal 01.09.2021, otoritas pajak telah memenuhi klaim keringanan pajak untuk biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk pemeliharaan jalan musim dingin di jalan setapak umum. Baik pembersihan jalan maupun pemeliharaan musim dingin di jalan setapak memenuhi syarat sebagai layanan yang berhubungan dengan rumah tangga. Persyaratan umum di sini adalah bahwa layanan tersebut sebanding dengan layanan bantuan rumah tangga. Selain itu, otoritas pajak tidak menganggap biaya pembersihan salju untuk jalan raya yang berbatasan dengan properti sebagai layanan terkait rumah tangga.

Ini berarti bahwa untuk layanan dalam rumah tangga pribadi, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan pajak sebesar 20%. sebesar 20%, hingga maksimum 4.000 euro, per tahun kalender untuk pengeluaran mereka. Jumlah pengurangan ini dikurangkan langsung dari pajak penghasilan yang harus dibayarkan sesuai dengan Bagian 35a EStG. Namun, biaya material untuk bahan penggerindaan harus ditanggung oleh pelanggan; hanya biaya tenaga kerja, mesin, dan biaya perjalanan yang dapat dikurangkan. Agar kantor pajak dapat mengakui biaya-biaya tersebut, setiap item harus ditunjukkan secara terpisah pada faktur.

Pengurangan pajak dapat diklaim pada tahun pembayaran yang bersangkutan. Persyaratan lebih lanjut untuk mengklaim pengurangan pajak adalah pembayaran dilakukan secara non-tunai dan pembayaran non-tunai tersebut dibuktikan dengan bukti transfer.

Bukti rumah tangga utama dalam kasus manajemen rumah tangga ganda

Rumah tangga ganda juga dapat didirikan untuk

alasan profesional jika wajib pajak memindahkan tempat tinggal utama mereka sebelumnya dari tempat kerja mereka untuk alasan pribadi dan kemudian mendirikan rumah tangga kedua di rumah tersebut, yang mereka tinggali di sana untuk mengejar pekerjaan mereka sebelumnya dari sana. Hal ini diputuskan oleh Pengadilan Pajak Cologne.

Pengadilan selanjutnya mengatakan, antara lain: Pusat kehidupan wajib pajak harus berada di rumah tempat rumah tangga utama dijalankan, di mana wajib pajak pada dasarnya hanya menghabiskan waktu di sana yang diselingi oleh ketidakhadiran yang berkaitan dengan pekerjaan dan hari libur. Apakah rumah karyawan di luar tempat kerja merupakan pusat kehidupannya harus ditentukan berdasarkan penilaian keseluruhan dari semua keadaan kasus individu. Dalam kasus karyawan yang sudah menikah, pusat kehidupan umumnya berada di tempat di mana pasangannya juga tinggal.

Permohonan tunjangan anak melalui email

Terdapat perselisihan di antara para pihak mengenai apakah pengadilan pajak Rhineland-Palatinate benar untuk mewajibkan kantor tunjangan keluarga untuk membayar tunjangan anak kepada pemohon untuk kedua anaknya untuk bulan Mei 2018 sampai dengan April 2019. Hal ini sangat bergantung pada apakah permohonan tunjangan anak pada tanggal 16/07/2019 juga dapat diajukan dengan cara yang efektif secara formal melalui email, karena sebelum tanggal 18/07/2019 hak atas tunjangan anak dan setelah tanggal 18/07/2019 hak atas pembayaran tunjangan anak terbatas pada enam bulan kalender terakhir sebelum awal bulan ketika permohonan tunjangan anak diterima.

Menurut keputusan Pengadilan Fiskal Federal, formulir permohonan tunjangan anak tidak tunduk pada persyaratan yang ketat, karena tunjangan anak berfungsi untuk menegakkan prinsip pembebasan pajak pada tingkat penghidupan minimum dan untuk memajukan keluarga. Pengadilan juga menyatakan bahwa istilah "secara tertulis", seperti yang digunakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak secara otomatis menyiratkan persyaratan tanda tangan dalam arti Hukum Perdata Jerman. Untuk pembayar PPN

Tidak ada pengurangan pajak masukan untuk perusahaan induk pengelola

Menurut Pengadilan Eropa, perusahaan induk tidak berhak untuk mengurangi PPN masukan untuk pasokan input yang diberikan kepada anak perusahaannya

sebagai kontribusi pemegang saham (kontribusi pemegang saham bebas). Sebaliknya, hak untuk mengurangi PPN masukan mengandaikan bahwa pasokan masukan yang dibeli secara langsung dan segera terkait dengan transaksi keluaran (kena pajak) perusahaan induk sendiri atau keseluruhan kegiatan ekonomi perusahaan induk.

Pengadilan Fiskal Federal mengikuti pandangan ini dalam keputusan selanjutnya.

Catatan

Sebagai hasil dari hukum kasus Pengadilan Fiskal Federal, berikut ini berlaku:

Perusahaan induk akan ditolak pengurangan pajak masukan untuk persediaan input jika:

- tidak secara langsung dan segera terkait dengan jasa kena pajak yang disediakan oleh perusahaan induk, tetapi dengan jasa gratis yang terutang olehnya sebagai kontribusi pemegang saham,
- tidak secara langsung dan segera terkait dengan penjualan perusahaan induk, tetapi dengan penjualan pihak ketiga (anak perusahaan),
- tidak termasuk dalam harga penjualan kena pajak yang dilakukan kepada entitas anak dan
- bukan merupakan bagian dari elemen biaya umum dari aktivitas ekonomi perusahaan induk itu sendiri.

Keberatan atas nota kredit - pencabutan pembebasan pembebasan pajak setelah spin-off

Pengadilan Fiskal Federal harus memutuskan apakah pernyataan pencabutan oleh pemasok dapat ditafsirkan sebagai pembatalan pembebasan pajak. Mengenai pengurangan pajak masukan dari nota kredit yang dicabut, tampak dipertanyakan apakah keberatan pemasok terhadap nota kredit karena spin-off sebelumnya setelah Undang-Undang Reorganisasi Jerman (Umwandlungsgesetz) tidak memiliki dampak pajak bagi penggugat, tetapi hanya untuk perusahaan yang mengakuisisi.

Setelah spin-off dimasukkan dalam daftar komersial, setiap keberatan terhadap nota kredit berdasarkan kontrak yang tercakup dalam spin-off harus dinyatakan kepada badan hukum yang mengakuisisi. Jika seorang pengusaha melepaskan pembebasan pajak atas suatu transaksi dengan menagih penerima transaksi dengan pernyataan PPN yang terpisah, pengusaha tersebut hanya dapat membalikkan pembebasan tersebut dengan menerbitkan faktur yang telah

dikoreksi tanpa PPN kepada badan hukum yang diakuisisi sebagai penerima layanan.

Hukum acara

Penyerahan korespondensi email atau jurnal lengkap - Wewenang otoritas pajak

Sebagai bagian dari audit eksternal, kantor pajak meminta penggugat untuk menyerahkan tanda terima dan reproduksi surat-surat komersial yang dikirim sesuai dengan Pasal 147 (1) No. 2 dan 3 Kode Fiskal Jerman (AO) serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan perpajakan sesuai dengan Pasal 147 (1) No. 5 AO, dan, jika dokumen yang diminta tersedia dalam bentuk elektronik, sebuah jurnal keseluruhan di mana semua email harus dicatat.

Pengadilan Fiskal Hamburg memutuskan bahwa wewenang berdasarkan Pasal 147 (6) AO hanya tersedia bagi otoritas pajak terkait dokumen yang wajib disimpan oleh wajib pajak sesuai dengan Pasal 147 (1) AO. Surat-surat komersial dalam pengertian Pasal 147 (1) no. 2 dan 3 AO bersama dengan Pasal 257 (2) dan 343 HGB tidak terbatas pada bentuk tertentu, yang berarti bahwa email juga dapat menjadi surat komersial. Dokumen terkait dengan transaksi komersial jika dokumen tersebut menyangkut persiapan, pelaksanaan, atau pembatalannya. Transaksi kinerja yang akan dilakukan dalam kerangka hubungan kontraktual, yang pada gilirannya memenuhi syarat sebagai transaksi komersial, seperti penyediaan informasi atau layanan, berkaitan dengan pelaksanaan transaksi komersial ini dan juga memenuhi syarat sebagai transaksi komersial. Jika transaksi kinerja tersebut diwujudkan dalam sebuah dokumen, maka dokumen tersebut tunduk pada kewajiban penyimpanan sesuai dengan Pasal 147 (1) no. 2 dan 3 AO.

Otoritas pajak tidak berhak untuk meminta penyerahan jurnal elektronik lengkap yang, menurut spesifikasi otoritas pajak, harus berisi informasi tentang setiap email yang diterima atau dikirim oleh wajib pajak. Permintaan untuk menyerahkan jurnal lengkap, di mana email yang tidak tunduk pada penyimpanan menurut Pasal 147 (1) AO juga harus dicantumkan atau disajikan sesuai dengan persyaratan otoritas pajak, melebihi wewenang otoritas pajak berdasarkan Pasal 147 (6) AO dan oleh karena itu melanggar hukum. Permintaan yang diformulasikan secara umum untuk penyerahan dokumen elektronik "en bloc" dapat, dengan mempertimbangkan hak wajib pajak atas kualifikasi pertama, memenuhi persyaratan kepastian dan tercakup dalam hak otoritas pajak untuk mengakses data sesuai dengan Pasal 147 (6) AO dan

proporsional.

Hukum ketenagakerjaan

Karyawan harus mencatat instruksi daftar nama untuk hari berikutnya di waktu luang mereka

Karyawan dapat diharapkan untuk membaca pesan teks dari pemberi kerja mereka tentang dimulainya shift kerja yang telah dijadwalkan sebelumnya di waktu luang mereka. Jika perjanjian perusahaan menetapkan bahwa tugas siaga untuk paramedis darurat harus diinstruksikan oleh pemberi kerja satu hari sebelumnya pada waktu tertentu, karyawan tidak boleh mengabaikan pesan teks tersebut. Hal ini diputuskan oleh Pengadilan Perburuhan Federal.

Dalam kasus khusus ini, seorang paramedis gawat darurat mengambil tindakan hukum terhadap majikannya. Majikannya telah gagal menghubunginya dua kali melalui telepon dan pesan teks dan dalam satu kasus juga melalui email untuk memberitahukan kepadanya bahwa jadwal jaga telah diubah dan dia harus datang lebih awal. Paramedis gawat darurat tersebut tidak memperhatikan pesan-pesan tersebut dan oleh karena itu tidak datang hingga jadwal yang direncanakan untuk memulai tugasnya. Namun, pemberi kerja menganggap dugaan keterlambatan tersebut sebagai ketidakhadiran yang tidak dapat dimaafkan dan mengurangi kredit dari akun waktu kerjanya dan memberinya peringatan dan kemudian teguran.

Hukum perdata

Pasangan tidak dapat lagi menggugat kontrak gabungan pernikahan dan warisan yang telah ditempatkan di safe keeping

Kontrak warisan yang hanya berisi disposisi setelah kematian nantinya dapat diminta untuk dihapus dari tahanan resmi. Menurut Pengadilan Tinggi Regional Frankfurt am Main, hal ini tidak mungkin terjadi jika kontrak pernikahan digabungkan dengan kontrak warisan - bahkan jika kontrak gabungan tersebut kemudian dibatalkan.

Dalam kasus sengketa tersebut, pasangan suami istri membuat kontrak yang diaktakan di hadapan notaris pada tahun 2011 di mana mereka mengubah kontrak pernikahan mereka dari tahun 1988 dan pada saat yang sama membuat kontrak waris. Mereka menempatkan dokumen kontrak tersebut dalam penyimpanan resmi. Pada tahun 2018, pasangan ini membuat surat wasiat bersama dengan akta notaris dan mencabut perjanjian waris yang diaktakan pada tahun

2011. Namun, perjanjian perkawinan dari tahun 2011 tidak berubah. Mereka juga menempatkan akta ini dalam penyimpanan resmi. Pada tahun 2018 dan 2019, pasangan tersebut tidak berhasil meminta penyerahan akta tersebut. Mereka kemudian mencabut kontrak dari tahun 2011 dan 2018 dengan akta notaris dari tahun 2022 dan sekali lagi mengajukan permohonan pengembalian akta. Kedua permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan pengesahan wasiat. Banding pasangan tersebut di Pengadilan Tinggi hanya berhasil terkait pengembalian surat wasiat bersama.

Pengakhiran untuk penggunaan pribadi karena penggunaan gedung apartemen sebagai rumah keluarga tunggal

Jika ada beberapa apartemen di sebuah bangunan tempat tinggal dan pemiliknya ingin menggunakan bangunan tersebut sebagai rumah keluarga tunggal di masa depan, pemberitahuan penghentian yang sesuai untuk penggunaan pribadi tidak berlaku jika tidak ada izin bangunan untuk konversi tersebut. Ini merupakan penghentian awal yang tidak dapat diterima. Ini adalah keputusan pengadilan distrik Hamburg.

Lain-lain

Tiket Jerman

Kementerian Keuangan Federal saat ini telah mengklarifikasi bahwa jika otorisasi perjalanan untuk transportasi umum lokal juga disetujui untuk penggunaan kereta api jarak jauh tertentu, hal ini masih merupakan perjalanan dengan transportasi umum lokal dalam arti Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Catatan

Sebagai hasilnya, Deutschlandticket juga dirilis untuk koneksi Intercity dan ICE tertentu.

Mengklaim tunjangan harga energi yang belum dibayar di pengadilan pajak

Pengadilan pajak bertanggung jawab atas pengaduan mengenai harga energi sekaligus yang harus dibayarkan untuk tahun 2022. Namun, yang harus digugat adalah kantor pajak dan bukan pemberi kerja. Hal ini diputuskan oleh Pengadilan Fiskal Münster.

Pemohon telah menggugat majikannya di Pengadilan Fiskal Münster untuk pembayaran tunjangan harga energi sebesar EUR 300 dan mengajukan permohonan

bantuan hukum untuk proses hukum tersebut.

Pengadilan menolak permohonan ini. Tidak ada kepentingan hukum untuk menggugat pemberi kerja karena mereka bukanlah debitur dari pembayaran sekaligus harga energi. Dengan membayar lump sum ini, pemberi kerja tidak memenuhi klaim upah karyawan mereka, tetapi bertindak sebagai agen pembayaran untuk negara. Lump sum harga energi adalah pengembalian pajak yang harus diklaim dari kantor pajak dengan menyerahkan SPT. Penafsiran ulang atas klaim yang menyatakan bahwa kantor pajak seharusnya menjadi tergugat tidak mungkin dilakukan karena penunjukan pemberi kerja yang jelas. Tindakan seperti itu juga tidak dapat diterima tanpa proses awal.

Perundang-undangan

Undang-Undang Bantuan Birokrasi IV (BEG IV)

Pada tanggal 11.01.2024, rancangan undang-undang untuk Bureaucracy Relief Act IV (BEG IV) yang diumumkan dalam perjanjian koalisi diterbitkan. Mengenai ekonomi, rancangan tersebut pada dasarnya berisi keringanan yang dapat dikaitkan dengan tiga langkah:

- Memperpendek periode penyimpanan dokumen akuntansi menurut hukum komersial dan pajak dari sepuluh menjadi delapan tahun (misalnya, salinan faktur, laporan rekening, dan daftar gaji).
- Pembatalan persyaratan bentuk tertulis atau penurunannya menjadi bentuk teks sesuai dengan Pasal 126b BGB (misalnya tidak ada persyaratan bentuk tertulis untuk sewa guna usaha komersial).
- Di masa mendatang, warga negara Jerman tidak lagi diharuskan mendaftar sebagai tamu hotel.

Perekonomian akan terbebas hingga 680 juta euro per tahun. 595 juta dari bantuan ini sendiri merupakan hasil dari periode retensi yang diperpendek. Pada saat yang sama, pemerintah federal mengatasi risiko kerugian pajak tahunan sebesar 200 juta euro, karena tidak mungkin lagi berhasil membuktikan penghindaran setelah sembilan atau sepuluh tahun tanpa dokumen akuntansi.

Dari segi isi dan mengenai bantuan moneter yang diharapkan, rancangan tersebut jauh dari harapan. Sebagai contoh, BEG IV tidak membahas rencana pengenalan basis data surat kuasa untuk hukum asuransi sosial. Topik ini masih dapat diangkat dalam proses legislatif yang sekarang sedang berlangsung. Sejalan dengan BEG IV, ada prosedur legislatif lain dalam

agenda yang ditujukan untuk mengurangi birokrasi bagi warga negara dan bisnis (Undang-Undang Peluang Pertumbuhan dan penerapan awal peningkatan ambang batas untuk menentukan kategori ukuran untuk perusahaan dengan kewajiban terbatas untuk tahun keuangan 2023).

"Undang-Undang Pembiayaan Anggaran Kedua" disahkan oleh Kabinet Federal

Pada tanggal 8 Januari 2024, pemerintah federal meluncurkan "Undang-Undang Pembiayaan Anggaran Kedua". Undang-undang ini berisi ketentuan-ketentuan berikut:

- Tarif pajak lalu lintas udara yang berlaku saat ini akan dinaikkan mulai tanggal 01.05.2024.
- Pendapatan dari tender lepas pantai pada tahun 2023 akan digunakan secara lebih luas. Sebagian akan masuk ke anggaran federal.
- Konsesi pajak untuk diesel pertanian akan berkurang secara bertahap mulai 1 Maret 2024 dan akan berhenti sepenuhnya mulai tahun 2026.
- Dalam skema tunjangan penghasilan dasar, peraturan diperketat bagi para pencari kerja yang dengan sengaja menolak untuk mengambil pekerjaan yang wajar.
- Bonus pendapatan warga negara akan dihapuskan, sementara insentif keuangan untuk pelatihan lanjutan terkait kualifikasi kejuruan melalui tunjangan pelatihan lanjutan dan premi pelatihan lanjutan akan dipertahankan.

Pemerintah federal bermaksud untuk memperkenalkan langkah-langkah lebih lanjut yang tidak memerlukan amandemen legislatif secara langsung ke dalam pertimbangan parlemen tentang anggaran federal 2024.

Anggaran 2024 diharapkan dapat memberikan bantuan kepada warga negara sebesar 15 miliar euro. **Tahap kedua dari Undang-Undang Penyesuaian Inflasi** telah berlaku sejak awal tahun. Hal ini meningkatkan tunjangan bebas pajak untuk orang dewasa dan anak-anak dan menyesuaikan tarif pajak penghasilan dengan inflasi.

Setelah pembahasan lebih lanjut, anggaran federal 2024 diperkirakan akan diadopsi pada minggu kedua sesi Bundestag pada akhir Januari 2024 sesuai dengan rencana ini. Bundesrat kemudian dapat menyimpulkan proses legislatif dalam pertemuannya pada 02.02.2024.

Tanggal pajak/jaminan sosial

Februari/Maret 2024

Jenis pajak		Kedewasaan	
Pajak penghasilan, pajak gereja, biaya tambahan solidaritas		12.02.2024 ¹	11.03.2024 ¹
Pajak penghasilan, pajak gereja, Biaya tambahan solidaritas		Tidak berlaku	11.03.2024
Pajak perusahaan, biaya tambahan solidaritas		Tidak berlaku	11.03.2024
Pajak pertambahan nilai		12.02.2024 ²	11.03.2024 ³
Pembayaran uang muka khusus pajak pertambahan nilai		12.02.2024	Tidak berlaku
Berakhirnya masa tenggang untuk jenis pajak di atas jika pembayaran dilakukan oleh:	Transfer bank ⁴	15.02.2024	14.03.2024
	Periksa ⁵	12.02.2024	11.03.2024
Pajak perdagangan		15.02.2024	Tidak berlaku
Pajak properti		15.02.2024	Tidak berlaku
Berakhirnya masa tenggang untuk jenis pajak di atas jika pembayaran dilakukan oleh:	Transfer bank ⁴	19.02.2024	Tidak berlaku
	Periksa ⁵	15.02.2024	Tidak berlaku
Asuransi sosial ⁶		27.02.2024	26.03.2024
Pajak keuntungan modal, biaya tambahan solidaritas		Pajak capital gain dan biaya tambahan solidaritas yang harus dibayarkan harus dibayarkan ke kantor pajak terkait pada saat yang sama dengan distribusi laba kepada pemegang saham.	

- Selama sebulan terakhir.
- Untuk bulan terakhir, untuk bulan sebelumnya dalam hal perpanjangan permanen, dan untuk kuartal kalender terakhir dalam hal pembayar triwulanan dengan perpanjangan permanen.
- Untuk bulan sebelumnya, untuk bulan sebelumnya dalam kasus perpanjangan permanen.
- SPT PPN dan SPT PPh masa depan umumnya harus diserahkan (secara elektronik) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode pelaporan. Jika tanggal 10 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka hari kerja berikutnya adalah tenggat waktunya. Tidak ada biaya keterlambatan pembayaran yang akan dikenakan jika pembayaran terlambat hingga tiga hari. Transfer bank harus dilakukan tepat waktu sehingga tanggal nilai pada rekening kantor pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
- Ketika membayar dengan cek, harap diperhatikan bahwa pembayaran tidak dianggap telah dilakukan hingga tiga hari setelah cek diterima oleh kantor pajak. Otorisasi pendebitan langsung harus diterbitkan sebagai gantinya.
- Iuran jaminan sosial jatuh tempo pada hari kerja bank ketiga terakhir pada bulan berjalan. Prosedur debit langsung disarankan untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran. Semua dana asuransi kesehatan memiliki tenggat waktu standar untuk mengirimkan laporan kontribusi. Laporan tersebut harus diterima oleh agen penagihan masing-masing selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo (yaitu pada tanggal 23.02.2024/22.03.2024, pukul 00.00 dalam setiap kasus). Keunikan regional mengenai tanggal jatuh tempo mungkin perlu dipertimbangkan. Jika akuntansi penggajian dilakukan oleh kontraktor eksternal, data upah dan gaji harus dikirim ke kontraktor sekitar sepuluh hari sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini berlaku khususnya jika tanggal jatuh tempo jatuh pada hari Senin atau pada hari setelah hari libur nasional.

Jejak

Konten ini telah disusun dengan sangat hati-hati, tidak mengklaim sebagai sesuatu yang lengkap dan tidak dapat menggantikan pemeriksaan dan saran dalam kasus-kasus individual.